

Kepala DTPH Kalsel salurkan bantuan kepada petani di Balangan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/233988/kepala-dtph-kalsel-salurkan-bantuan-kepada-petani-di-balangan>

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, Syamsir Rahman menyerahkan bantuan benih padi dan bibit jagung kepada petani di Balangan yang terdampak banjir. Kepala DTPH Kalsel, Syamsir Rahman di Paringin Rabu mengatakan penyerahan benih padi dan bibit jagung merupakan langkah dari Pemprov Kalsel untuk membantu para petani khususnya di Balangan. Sebagaimana kita ketahui sawah dan perkebunan mereka terendam akibat banjir yang mengakibatkan gagal panen.

"Tujuan penyerahan bantuan sendiri untuk membantu warga yang sawah dan kebunnya terdampak banjir, terutama yang gagal panen. Selain benih padi, ada juga bantuan berupa bibit jagung yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang totalnya mencapai lima ton," tuturnya.

Dia menambahkan, menurut data dari pihaknya ada sekitar 200 hektar lahan pertanian di Balangan yang terdampak banjir yang mengakibatkan para petani kehilangan bahan pangan sekitar 800 ton. Di tempat yang sama, ketua kelompok tani Desa Teluk Karya Kecamatan Lampihong, Rojani mengucapkan terimakasih atas bantuan pemerintah provinsi yang telah memberikan bantuan benih padi serta bibit jagung kepada para petani di Balangan.

"Sebelumnya di desa kami selama beberapa tahun terakhir selalu dapat panen, hanya tahun ini kami gagal panen, dikarenakan banjir sehingga bibit benih kami menjadi busuk dan tidak layak digunakan," kata dia.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rahmadi mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Kalsel yang telah membantu para petani di Balangan untuk menanam kembali benih padi serta bibit jagung yang sebelumnya terdampak banjir. Acara yang berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Lampihong ini dihadiri oleh Kepala DTPH Provinsi Kalsel beserta jajaran juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan beserta jajaran.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/233988/kepala-dtph-kalsel-salurkan-bantuan-kepada-petani-di-balangan> , Kepala DTPH Kalsel salurkan bantuan kepada petani di Balangan, 10 Februari 2021.
2. <https://kalsel.inews.id/berita/bantu-petani-terdampak-banjir-di-balangan-pemprov-kalsel-salurkan-5-ton-benih-padi-dan-jagung> , 11 Februari 2021.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan

pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.